BAB I
PENDAHULUAN

Bab I membahas pendahuluan yang mendeskripsikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis.

1.1 Latar Belakang Masalah

Ujaran kebencian layaknya duri dalam daging bangsa Indonesia, dan tema tentang preferensi jurnalis dalam mencegah ujaran kebencian di media sosial sebagai dampak dari kebebasan berdemokrasi amat penting serta menarik untuk diteliti, menyoroti beberapa hal pokok. Pertama, sebaran ujaran kebencian di era kekinian makin masif dalam alam digital. Berdasarkan hasil survey Marsyarakat Telematika (Martel) pada Februari 2017 menunjukan angka Ujaran kebencian yang berkaitan dengan sosial politik (pilkada dan pemerintahan) sebesar 91.80 persen dan isu SARA sebesar 88.60 persen. Persentase ini tidaklah sedikit, mengingat kata Kneuer (2016, hlm. 667) media digital dianggap sangat berpotensi dalam proses berdemokratisasi dan komunikasi politik.

Kedua, kebebasan berekspresi atau berbicara (ujaran biasa) (Komnas HAM, 2015, hlm. vi) dalam kehidupan berdemokratisasi memberi ruang bagi setiap kewargaan maupun jurnalis untuk menyampaikan pendapat di muka umum, alih-alih jurnalis yang memproduksi berita di media sosial terkadang mengesampingkan etik sehinga ujaran kebencian ikut terselip di dalam berita yang diproduksi. Berdasarkan data yang dilansir dalam tribunnews.com bahwa penyidikan aparat Kepolisian Republik Indonesia, menemukan kelompok Saracen memiliki 2000 akun media sosial yang kemudian berkembang menjadi 800.000 akun digunakan untuk menyebar konten kebencian.

Ujaran kebencian harus ditangani, asumsi ini beralasan, karena bertentangan dengan Pancasila khususnya yang menekankan Persatuan Indonesia dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, maupun semboyan Bhineka Tunggal Ika (Komnas HAM, 2015, hlm. 5). Jurnalis keberagaman selayaknya berkiblat pada nilai-nilai yang

terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seumpama lidi yang hanya bisa membersihkan ketika dikumpulkan menjadi satu (sapu lidi), ujaran kebencian hanya bisa diberantas ketika para jurnalis memahami sekaligus mengamalkan kode etik dalam sikap dan tingkah lakunya, agar berita yang diproduksi bebas kontaminasi ujaran kebencian.

Ketiga, eforia demokratisasi menjalar hampir ke seluruh elemen bangsa (Suryadi, 2010, hlm. 3), kebebasan berdemokratisasi layaknya pedang bermata dua, di satu sisi memberi peluang bagi warga untuk menyampaikan buah-buah pemikiran yang cerdas demi pembetulan pemerintahan berjalan, namun dari sisi lain kebebasan ini terkesan kebablasan, karena disertai ujaran kebencian yang sengaja ditujukan untuk melambatkan putaran roda pemerintahan. Tindakan yang melanggar etik ini sangat mengerikan, mengingat dampak ujaran kebencian mencakup psikologis dan fisik yang tidak ada habisnya (Garnets, Herek, & Levy, 1992; Gutek & Koss, 1993; Lawrence, 1993; Matsuda, 1989, 1993), juga perannya sebagai pendahulu kekerasan fisik (Baron, 1979).

Ujaran kebencian layaknya genosida yang bisa menimbulkan *irreversial dagame* (kerusakan yang tidak dapat dipulihkan) bagi generasi yang hidup di era kekinian. Layaknya mercusuar yang berfungsi untuk membantu navigasi kapal laut agar tidak tersesat, kehadiran jurnalis di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara diharapkan menjadi kompas moral guna menyelamatkan akal dan keyakinan setiap generasi.

Tidak kalah menarik, mantan Menteri Pertahanan RI H. Matori Abdul Djalil (Pergulatan membela yang benar: biografi Matori Abdul Djalil, 2008, hlm. 327) menegaskan bahwa stabilitas nasional merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka membangun demokrasi, tanpa stabilitas nasional yang mantap mustahil proses demokrasi dapat berjalan dengan baik. Tidak pelak lagi, sebaran ujaran kebencian yang masif dalam dunia daring sudah pasti dapat menggoyangkan stabilitas nasional bahkan menghambat proses demokrasi. Jika negara berada dalam keadaan tidak bergejolak,

niscaya demokratisasi dapat berjalan dengan baik dan benar sebagaimana diharapkan kewargaan dan pemerintah.

Dunia dalam kotak kaca, media sosial sebagai *platform* penyebaran informasi kian masif dan tidak terhalang ruang dan waktu selayaknya dijadikan sebagai wahana berdemokrasi yang berfungsi meneguhkan hubungan antar kewargaan dan bukan sebaliknya memecah bela persatuan. Seperti yang dikatakan **Lon Safko (2012, hlm. 2),** media sosial adalah media yang kita gunakan untuk menjadi sosial, sebagaimana dikukuhkan Aristoteles *(The World Book Encyclopedia, 1995)* bahwa manusia adalah *zoon politicon* dan bukan *homo homini lupus* seperti yang dicetuskan Plautus dalam karnyanya yang berjudul *Asinaria* (Calloni, 2016, hlm. 74*).*

Berdasarkan data yang dilansir Liputan6.com, Indonesia menduduki peringkat ke-4 di dunia dengan pengguna media sosial paling aktif. Hal ini diungkap dari laporan riset *We Are Social* dan *Hootsuite* yang dirilis di LinkedIn. Selanjutnya, riset Reuters Institute 2016 yang dilansir tirto.id, menyatakan bahwa kecenderungan orang membaca berita melalui media sosial memang semakin tinggi. Bahkan survei di tahun berikutnya, 19 persen responden Reuters malah sengaja membuka Facebook untuk mencari berita. Namun, hati-hati, selain jadi saluran kebebasan berekspresi, media sosial juga jadi saluran kebebasan untuk membenci.

Seperti sepenggal lirik lagu dari Arie Wibowo, *"madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu",* itulah unggkapan yang tepat untuk menggambarkan bagaimana berguna sekaligus berbahayanya media sosial di abad-21 ini. Manfaat dan kerugian media sosial berjalan beriringan laksana padi yang tumbuh bersama dengan rumput, patutnya penyebaran ujaran kebencian dipangkas guna menjaga stabilitas persatuan dalam keberagaman.

Keempat, dari zaman verbal hingga nonverbal, media kertas hingga media daring, produksi berita berbanding timpang dengan dimensi etis. Meminjam istilah teknis vs etik (Suryadi, 2017), *overmacht (force majeure)* dari perkembangan teknologi yang terlalu cepat tidak menyerentakkan literasi digital, *media education*

(Buckingham, 1190), *peadagogy of media literacy* (Toland-Frith, 1997), *media studies* (Fedorov, 2002), dan *media literacy* (Hobbs, 1998), yaitu adanya kesadaran dari banyak pesan media dan kemampuan kritis dalam menganalisis dan mempertanyakan yang dilihat, dibaca, dan ditonton (Hobbs, 2001; Silverblatt, 1995; Singer & Singer, 1998). Masifnya konten negatif di media sosial berbading lurus dengan respon jempol *netizen* sebagai warga dunia daring yang *men-like, commen,* dan *share* informasi yang belum terverifikasi, disiplin melakukan konfirmasi (tabayun) adalah tindakan yang bijak (Suryadi, 2017).

Sebaran ujaran kebencian dalam dunia daring laksana *maligna* (tumor ganas) yang terus menyebar tanpa terkontrol, mitigasi mutlak harus dilakukan jurnalis maupun warga yang cakap dalam jagat internet guna memenyelamatkan akal dan keyakinan setiap kewargaan dari bahaya invasi ujaran kebencian. Data yang diliansir mediaindonesia.com, perusahaan raksasa internet dunia google mengumumkan sebuah sayembara dengan hadian pendanaan sebesar USD 5 juta untuk inovasi teknologi yang bisa memberantas konten ujaran kebencian dan terorisme di jagat internet. Tidak pelak lagi, sayembara ini semakin mengukuhkan keyakinan kita bahwa dunia daring tak ubahnya hutan rimba yang dipenuhi beragam hewan buas yang siap menerkam mangsanya saat lengah.

Mungkin paragraf di atas terkesan dibesar-besarkan bagi segelintir orang. Namun, kasus genosida etnis Tutsi di Rwanda (Afrika Tengah) bukanlah sebuah mitos belaka. Dalam waktu 1 minggu, 800,000 atau paling banyak sekitar satu jiwa etnis Tutsi menjadi korban pembantaian berbasis kebencian. Jumlah ini adalah 1/3 dari seluruh populasi Tutsi. Perempuan Tutsi menjadi target perkosaan secara sistematis (Komnas HAM, 2015, hlm. 6-7). Berpijak pada kasus tersebut, patutnya perkembangan teknologi menyinkronkan kemelekan digital guna memangkas jarak ketimpangan antara teknik dan etik.

Proses imitasi atas apa yang terjadi di media sosial (ujaran kebencian) ke dalam dunia nyata tidak hanya isapan jempol belaka. Asumsi ini terkonfirmasi oleh Newcomb

(Muhtadi, 2016, hlm. 30) bahwa dalam konteks sosiologis, perubahan suatu masyarakat umumnya dipengaruhi oleh adanya informasi baru yang diterimanya, yang relevan dengan tuntutan kondisional serta kapan dan dimana informasi itu diterima. Layaknya gelombang laut yang terus bergerak hingga ke tepi pantai, dampak ujaran kebencian akan terus terasa hingga ke sudut-sudut kewargaan, pembangunan *dike* (tanggul) merupakan suatu kemutlakan guna menghindari abrasi moral.

Adalah akibat kekhawatiran akan minimnya literasi media di era kotak kaca ini sehingga pada tanggal 7-8 maret 2002 di Berlin Jerman diadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang diberi nama 21st Century Literacy Summit yang berfokus pada standar-standar literasi adad ke-21. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ini akhirnya menghasilkan "buku putih" dengan judul 21st Century Literacy in a Convergent Media World. Konsep baru literasi (buku putih) memasukan beberapa komponen; literasi tekonologi, literasi informasi, kreativitas media, serta tanggung jawab dan kompetensi sosial (Iriantara, 2009, hlm. 9 & 10). Tak pelak lagi, literasi digital merupakan suatu keniscayaan guna menjaga dunia nyata tetap stabil dari huru-hara dunia daring.

Kelima, berharap meraup profit lebih, para oknum jurnalis yang tidak bertanggung jawab bahkan rela melakukan distorsi terhadap fakta yang ada guna menghasilkan pundi-pundi haram dari kepolosan *netizen* di media sosial.

Berdasarkan data yang dilansir nasional.kompas.com bahwa kelompok Saracen menetapkan tarif sekitar Rp 72 juta dalam proposal yang ditawarkan ke sejumlah pihak. Biaya tersebut meliputi biaya pembuatan *website* sebesar Rp 15 juta, dan membayar sekitar 15 buzzer sebesar Rp 45 juta perbulan. Ada pula anggaran tersendiri untuk Jasriadi selaku ketua sebesar Rp 10 juta. Selebihnya, biaya untuk membayar orang-orang yang disebut wartawan.

Para wartawan itu nantinya menulis artikel pesanan yang isinya juga diarahkan pemesan. Media yang digunakan untuk menyebar konten tersebut antara lain di Grup Facebook Saracen News, Saracen Cyber Team, situs Saracennews.com, dan berbagai grup lain yang menarik minat warganet untuk bergabung.

Alih-alih jurnalis yang menghidangkan berita di media sosial didasarkan pada kepentingan pasar (*market oriented*), sehingga sulit terlepas dari kepentingan persorangan maupun kelompok tertentu (Malatuny, 2017, hlm. 1). Kondisi media sosial tanah air saat ini layanknya pesawat yang sedang mengalami *turbulence* (turbulensi), atau tak ubanya perahu yang sedang terombang-ambing kian kesana-kemari.

Keenam, tema dalam karya ilmiah ini bukanlah riset awal, namun menjadi hal yang unik manakala penulis memilih para jurnalis sebagai subjek penelitian. Pemilihan ini didasari atas pertimbangan beberapa fungsi pers yakni sebagai media informasi, pendidikan, dan kontrol sosial—kekuatan keempat" *(the fourth estate)*— (UU RI Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers; Muhtadi, 2016) yang dalam satu dasawarsa terakhir kurang optimal bahkan keluar dari koridor. Jelas dalam UU RI Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Pasal 5 Ayat 1 dengan tegas menyatakan pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Namun karena para jurnalis tidak menjalankan fungsinya dengan benar, pada akhirnya muncullan celah masuknya ujaran kebencian ke dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Seorang filsuf (Muhtadi, 2016, hlm. 17) pernah berkata berilah publik apa yang mereka inginkan. Berilah publik suatu kebenaran yang harus dipunyainya. Inilah fungsi sejati dari pers yang bertanggung jawab sosial *(social responsibility)* (Kusumaningrat dan Kusumaningrat, 2016, hlm. 20). Adalah harga mati ketika informasi yang dihidangkan kepada masyarakat seharusnya merupakan informasi yang terkonfirmasi—telah melalui beberapa pedoman penulisan berita yang semestinya.

Jurnalis seharusnya dapat menajadi obat penawar dalam mengatasi kebebasan negatif pada *platform* media sosial. Kebebasan *netizen* di satu sisi dapat menciptakan suatu konten baik dan menarik, di sisi lain juga dapat menciptakan konten yang memiliki dampak merusak. Jika media sosial di tanah air bebas kontaminasi ujaran kebencian, maka setiap warga negara dan penduduk dapat mengkonsumsi informasi

atau berita yang berkualitas layaknya suplemen yang dapat menguatkan sistem imun tubuh dari bahaya virus dan bakteri dan bukan sebaliknya menjadi seorang pengidap *alexithymia*—suatu gangguan psikologis yang dicirikan dengan kemampuan empati yang kurang, serta mengalami kesulitan besar dalam memahami dan merespons perasaan orang lain (segiempat.com).

Layaknya *brainware* yang selalu mengikuti perkembangan *hardware* dan *software*, jurnalisme sebagai profesi dan sebagai industri berita selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perubahan teknologi, baik dari segi menanggapi transformasi maupun inovasi yang inspiratif (Beckett & Deuze, 2016, hlm. 2). Asusmsi di atas semakin dikukuhkan oleh Santana (2017, hlm. 4) yang mengatakan bahwa jurnalis bahkan menjadi bagian dari perkembangan teknologi informasi. Namun, salah satu dampak negatif yang mencengangkan dari kemajuan teknologi lebih khusus bidang *web (surface web)* adalah mudahnya memanipulasi informasi di dunia daring.

Dilansir dari laman antaranews.com, status Gunung Agung kali ini berada dalam era yang jauh berbeda dengan tahun 1963 saat meletus yang terakhir, yakni era digital yang memungkinkan terjadinya "letusan" sebelum waktunya. Manipulasi atau rekayasa itu sudah dialami Gunung Agung saat terjadi peningkatan gejolak vulkanik Gunung Agung di Karangasem, Bali, dari status Waspada menjadi Siaga (18/9/2017). Rekayasa yang dimaksud itu dialami Gunung Agung pada 24 September 2017 atau selang dua sehari perubahan status dari Siaga ke Awas. Rekayasa itu menampilkan video tentang gunung lain yang memuntahkan lahar, tapi diberi judul "Gunung Agung Meletus". *Viralisasi,* itulah satu kata yang menjadi tujuan oleh beragam aktor yang tidak bertanggung jawab guna memperoleh keuntungan dari penyebaran informasi yang memicu kepanikan semu belaka.

Asumsi di atas didukung oleh data yang dilansir famous.id bahwa ternyata menurut penelitian, berita buruk lebih banyak diminati karena kecenderungan otak manusia yang lebih memperhatikan berita yang cenderung negatif *(negativity bias)*—berita yang membuat kita lebih berhati-hati. Inilah yang menjadi alasan mengapa berita

buruk lebih cepat menjadi *viral* ketimbang berita baik. *Viral*-nya informasi dalam media daring tak selamanya berbanding lurus dengan kualitas informasi atau berita tersebut, populer belum tentu berkualitas, dan berkualitas belum tentu populer. Itulah yang menjadi gambaran fenomena dunia pers nasional saat ini, disaat berita buruk layaknya *main course* dan berita baik tak ubahnya *dessert (bad news is a good news).*

Layaknya kutub positif dan kutub negatif baterai, dampak dari sistem pemerintahan demokrasi juga memiliki hal yang sama. Positifnya adalah ketika transparansi informasi mengalir bagaikan air di sungai, dan negatifnya ialah informasi yang mengalir ternyata tidak semua menyangkut hal-hal yang baik dan benar. Mendasari pada Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin. Pak post –jurnalis– yang bertugas menyampaikan surat –dari masyarakat– kepada penerima surat –pemerintah– merupakan suatu analogi sederhana untuk menggambarkan hubungan *Golden Triangle* ini.

Kekuatan dalam membentuk opini media merupakan suatu hal sangat *superior* dan tak terbantahkan lagi. Bahkan pelaporan jurnalis kepada masyarakat antar bangsa mempunyai dampak pada pembentukan opini publik: bisa menambah dan menghilangkan dukungan publik (Santana, 2017, hlm. 76). Layaknya setetes air yang jatuh dan menimbulkan gelombang *longitudial,* informasi atau pelaporan dengan jurnalis sebagai porosnya, dapat mempengaruhi semua lapisan masyarakat, baik lokal, nasional, regional, bahkan global.

Peran jurnalis dalam era mudahnya memanipulasi ini sepatutnya menjadi sang pengayak demi kelancaran aliran informasi yang pas, dan bukan menyampaikan informasi yang bersifat *hyperrealitas*—kepalsuan berbaur dengan keaslian, guna membentuk keyakinan yang bersifat fatamorgana (Baudrillard, 1983; Poti, 2011).

Jurnalis seharusnya menjadi penyebar berita netral nan objektif. Seperti *chef* dan *eatie*, hubungan jurnalis dan khalayak konsumen tidak dapat dilepaspisahkan, adalah sebuah kemutlakan ketika jurnalis selayaknya menjadi seorang *chef* —bukan sekedar koki— yang pada gilirannya akan menghidangkan makanan yang berasal dari bahan-bahan yang berkualitas serta memiliki cita rasa bintang lima, dan tidak akan membuat yang menikmatinya mengalami *botulisme*—keracunan makanan *(food poisoning).*

Pembentukan karakter kewargaan dilakukan secara berkesinambungan, sama seperti halnya dengan petitih "pendidikan hingga akhir hayat", proses pemantapan tiga komponen utama *civic education* yang bermutu, yaitu pengetahuan kewarganegaraan *(civic knowledge),* kecakapan kewarganegaraan *(civic skills),* dan watak kewarganegaraan *(civic dispositions)* (Branson, 1999, hlm. 8) juga dilakukan secara berkelanjutan mengingat sifat dinamisnya masyarakat.

Proses mencerdaskan kehidupan bangsa tidak hanya terputus pada dinding-dinding kaku sekolah saja, dan tidak terbatas pada sosok guru dalam kelas juga. Guru adalah semua orang, dan semua tempat bisa dijadikan tempat untuk menyauk ilmu. Jurnalis berada di barisan terdepan dalam upaya pendistribusian informasi yang berkualitas kepada masyarakat (disiplin verifikasi) guna mencapai tujuan negara susuai Undang-Undang Dasar 1945. Pemberitaan oleh jurnalis yang "benar" dapat memanusiakan manusia lainnya—*si tou timou tumou tou.*

Media massa layaknya penulis skenario dalam kehidupan nyata, karena peran yang dimainkan media massa sangat berpengaruh dalam kehidupan kewargaan, pemahanam mengenai mekanisme psikososial berkaitan dengan pengaruh komunikasi simbolis, dampak, dan tindakan manusia sangatlah penting, mengingat perilaku dibentuk dan dikendalikan baik oleh pengaruh lingkungan atau disposisi internal (Bandura, 2001, hlm. 265). Dampak media massa terhadap peniruan perilaku kewargaan menurut teori kognitif sosial komunikasi massa Albert Bandura terjadi dalam tiga komponen (unsur) yaitu perilaku model (contoh), pengaruh perilaku model, dan proses internalisasi. Jadi individu melakukan pembelajaran dengan proses

mengenal perilaku model (perilaku yang akan ditiru), kemudian mempertimbangkan dan memutuskan untuk meniru sehingga menjadi perilakunya sendiri. Perilaku model ialah berbagai perilaku yang dikenal di lingkungannya. Apabila bersesuaian dengan keadaan dirinya (minat, pengalaman, cita-cita, tujuan dan sebagainya), maka perilaku itu akan ditiru (Mohamad, 2004, hlm. 44). Ketika khalayak melihat, membaca, dan mendengar informasi dari beragam sumber media massa, maka dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut adalah suatu keniscayaan.

Lahirnya warga negara yang efektif dalam tindakan *(effective citizen)* (Wahab & Sapriya, 2011, hlm. 30) merupakan perpaduan dari berbagai komponen-komponen pendidik, dan jurnalis tidak dapat disingkirkan dari daftar tersebut. Jurnalisme berfungsi sebagai pendidik, pendidik multi bidang—moral, politik, hukum, dan ekonomi. Seperti yang diungkapkan Prof. Drs. H.A.W. Widjaja, pers berfungsi sebagai alat pendidikan yang paling murah (Widjaja, 2008, hlm. 54). Kemampuan merespon berbagai isu-isu kewarganegaraan dalam berbagai wilayah —lokal, nasional, regional, global— didasari atas pertimbangan dari beragam informasi yang ada dalam bank informasi setiap kewargaan. Lebih lanjut berkaitan dengan peran jurnalis, Peter J. Anderson (Jorgensen & Hanitzsch, 2009, hlm. 239) mengemukakan bahwa:

> *Independent news journalism which provides accurate and thoughtful information and analysis about current events is crucial to the creation of an enlightened citizenry that is able to participate meaningfully in society and politics.*

Jurnalisme berita independen yang menyediakan Informasi akurat dan bijaksana dan analisis tentang peristiwa terkini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menciptakan kewargaan yang mampu berpartisipasi secara sadar dalam masyarakat dan politik.

Berdasarkan hasil studi awal penelitian, terdapat beberapa masalah terkait dengan judul tesis ini. Pertama, Kota Manado tidak semata-mata terhindar dari pandemik ujaran kebencian. Data yang dilansir Manadopostonline.com, sejak 2016

hingga 2017 (Mei) sudah ada 64 kasus yang diselidiki penyidik Unit Cyber Crime Polda Sulut terkait dengan penyebaran ujaran kebencian di media sosial. Kedua, terdapat beragam isu-isu miring yang melibatkan jurnalis di Kota Manado terkait dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), dimulai dari tidak mencantumkannya sumber berita, plagiarisme hingga kasus makar.

Seperti yang dikatakan Rachmadi (Septohadi, 2011, hlm. 129) bahwa sistem pers memang tidak terlepas hubungannya dengan sistem sosial dan sistem politik dari suatu masyarakat atau bangsa, karena hubungan pers itu adalah dengan pemerintah dan masyarakat, di mana hubungannya atau interaksinya itu tidak bisa dihilangkan. Jadi sistem pers itu tidak akan terlepas dari pengaruh pemikiran atau filsafat yang mendasari sistem masyarakat dan sistem pemerintahan, dimana pers itu berada dan beroperasi. Maka dari itu, perpaduan antara keprofesionalitas jurnalis dengan jangkauan pemberitaan yang tidak terpagari batas wilayah —laut, darat, dan udara— selaknya dapat membentuk kewargaan yang memiliki kontruksi pemikiran yang mempuni-berpikir kritis demi kokohnya moralitas kewargaan dan terwujudnya *smart and good citizen.*

Tak pelak lagi, preferensi jurnalis dalam mencegah sebaran ujaran kebencian di media sosial merupakan jalan vital guna mencegah kasus genosida etnis Tutsi di Rwanda tidak terjadi lagi, bahkan mencegah hal yang lebih mengerikan terjadi, pemusnahan peradaban.

Mendasari akan begitu pentingnya peran jurnalis dari masa ke masa, maka tema dalam penulisan ini amat krusial untuk dikaji. Selayaknya diteliti karena penulis meyakini akan terjadi kerugian apabila tema dalam tesis ini tidak diteliti kemudian dicarikan solusi.

Berbagai masalah yang telah dirincikan sebelumnya akan dijawab dengan penelitian yang dilakukan dengan judul **"Peran Jurnalis Dalam Mencegah Ujaran Kebencian Di Media Sosial Sebagai Usaha Untuk Meningkatkan Solidaritas**

Masyarakat Multietnik Melalui Literasi Media (Studi Kasus Pada Jurnalis Di Kota Manado)"

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Ujaran kebencian merupakan informasi negatif yang menyesatkan pikiran masyarakat dan memiliki dampak yang sangat membayakan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dampaknya antara lain, rusaknya moralitas bangsa, tergoyahnya kedamaian, saling mencurigai antar masyarakat, diskriminasi terhadap pihak-pihak tertentu, serta yang paling berbahaya adalah memecah-bela persatuan NKRI. Terlebih lagi jika dipadukan dengan perkembangan dunia digital, membuat sebaran informasi dalam dunia daring terjadi semudah membalikkan telapak tangan, maka sebuah kemutlakan untuk membendung atau setidaknya meminimalisis derasnya aliran informasi yang berbau ujaran kebencian ini. Dan pada tahap ini, masyarakat sangat memerlukan peran jurnalis sebagai anjing penjaga guna mencegah hal-hal yang jahat masuk ke dalam lingkungannya.

Fokus dalam penelitian ini dirumusankan dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran jurnalis dalam proses pengkonstruksian warga negara yang melek media sosial di Kota Manado?
2. Mengapa ujaran kebencian muncuat dari warga negara di Kota Manado?
3. Mengapa literasi media begitu urgen dalam mencegah ujaran di Kota Manado?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana peran jurnalis dalam proses pengkonstruksian kewargaan yang melek media daring di Kota Manado.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana peran jurnalis dalam proses pengkonstruksian warga negara yang melek media sosial di Kota Manado.
2. Untuk mengidentifikasi sebab-sebab mengapa ujaran kebencian muncuat dari warga negara di Kota Manado.
3. Untuk menganalisis urgennya literasi media bagi warga negara di Kota Manado.

1.4 Maanfaat Penelitian

1.4.1 Segi Teoritis

1. Penelitian ini dapat menambah kekayaan ilmu pengetahuan tentang peran jurnalis dalam proses pengkonstruksian kewarganegaraan yang melek media sosial di Kota Manado.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi program studi Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengkaji peran jurnalis dalam proses pengkonstruksian kewarganegaraan yang melek media sosial.

1.4.2 Segi Praktis

Manfaat penelitian secara praksis adalah sebagai berikut:

1. Bagi Jurnalis: Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau rujukan bagi para jurnalis di Kota Manado.
2. Bagi Peneliti: Bahan pengalaman, masukan, serta penambahan tabungan dalam bank informasi tentang preferensi jurnalis dalam dalam mencegah ujaran kebencian sebagai dampak dari kebebasan berdemokrasi di media sosial.
3. Bagi Masyarakat: Dapat memberikan pemahaman kepada kewarganegaraan tentang pentingnya pengkonstruksian ketrampilan berpikir kritis melalui literasi media dalam upanyanya memahami setiap isi pesan dalam media daring.
4. Bagi Pemerintah: Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi yang dapat mempertegas tentang betapa pentingnya pengkonstruksian

ketrampilaan kewarganegaraan melalui melek media daring sekaligus memanfaatkan informasi dari media daring dalam membentuk keteladan dari pejabat pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Struktur penulisan tesis yang akan ditulis terdiri dari 5 bab; Bab I membahas pendahuluan yang mendeskripsikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi penulisan tesis. Bab II membahas tentang jurnalistik, pers, teori pers, ujaran kebencian *(hate speech atau cyberhate)*, media sosial, konsep solodaritas, masyarakat multietnik, literasi, teori *agenda setting*, ketrampilan berpikir kritis, penelitian terdahulu.

Bab III membahas tentang metode penelitian. Adapun sub bab yang dibahas dalam bab ini mencangkup desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan agenda penelitian. Bab IV membahas temuan dari pembahasan, yang dibahas yaitu temuan, hasil temuan, dan pembahasan meliputi deksripsi penelitian. Bab V membahas tentang Simpulan-implikasi dan rekomendasi. Adapun sub bab yang dibahas yaitu simpulan umum, simpulan khusus, implikasi dan rekomendasi.